

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH
(Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**NUR INDAH RAHMAWATI
NIM. C2C606087**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2010**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Nur Indah Rahmawati
Nomor Induk Mahasiswa : C2C606087
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH
(Studi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah)**
Dosen Pembimbing : Dr. H.Abdul Rohman, SE., Msi., Akt

Semarang, 10 Mei 2010

Dosen Pembimbing,

(Dr. H.Abdul Rohman, SE., Msi., Akt)

NIP. 19660108 199202 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Nur Indah Rahmawati
Nomor Induk Mahasiswa : C2C606087
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi
Judul Skripsi : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)
TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH
(Studi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 26 Mei 2010

Tim Penguji:

1. Dr. H.Abdul Rohman, SE., Msi., Akt (.....)
2. Suryo Rahardjo, SE., M.Si., Akt (.....)
3. Andri Prastiwi, SE., M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nur Indah Rahmawati menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (STUDI PEMERINTAHAN DI KABUPATEN/KOTA JAWA TENGAH)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Mei 2010

Yang membuat pernyataan,

(Nur Indah Rahmawati)

NIM : C2C606087

ABSTRACT

From 33 provinces and 471 districts / cities in Indonesia, only about 10 percent which have a formal delimitation, one of it is Central Java province which has 35 districts. Central Java province has an income sources and the abundant natural wealth in each area. Therefore, aims of this study are to proof empirically the influence of Regionally Original Income (PAD), and General Allocation Fund (DAU) on the allocation of Regional Expense in districts and municipalities in Central Java.

This study uses 35 samples in Central Java, which the source is from the Realization Report of the Estimate Income of Regional Expense (APBD) from 2007 until 2009. Method of the sample uses census method by taking the entire population. The instrument that used result is a multiple regression.

Result of this study indicates that the DAU and the PAD have a significant impact on regional expense allocations. Furthermore, the dependence level on regional expense allocation is more dominant to PAD than DAU.

Keyword : Regionally Original Income (PAD), General Allocation Fund (DAU), the allocation of Regional Expense, The Realization Report of the Estimate Income of Regional Expense (APBD).

ABSTRAKSI

Dari 33 provinsi dan 471 kabupaten/kota di Indonesia, hanya sekitar 10 persen yang mempunyai penetapan batas wilayah yang resmi salah satunya provinsi Jawa Tengah yang memiliki 35 kabupaten/kota . Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber-sumber pendapatan dan kekayaan alam yang melimpah di setiap daerahnya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 35 daerah di Jawa Tengah yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2007 hingga 2009. Metode pengambilan sampel menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi . Alat yang digunakan penelitian adalah regresi linier berganda.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Jika dilihat lebih lanjut, tingkat ketergantungan alokasi belanja daerah lebih dominan terhadap PAD daripada DAU.

Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Alokasi Belanja Daerah, Laporan Realisasi APBD.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kepada Allah SWT, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **"PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (STUDI PEMERINTAHAN DI KABUPATEN/KOTA JAWA TENGAH)"**. Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan program strata satu pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Chabachib, Msi, Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Dr. H. Abdul Rohman, SE., Msi., Akt, selaku Dosen Pembimbing yang telah sangat sabar membimbing dalam penulisan skripsi ini dan menjadi motivator dan inspirator bagi saya.
3. Anis Chariri, SE, M.Com, Ph.D, Akt, selaku dosen wali.
4. Dosen-dosen yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk membantu mengerjakan proyek BLU UNDIP, Warsito Kawedar, SE, M.Si, Akt., Tri Jatmiko W.P., SE, M.Si, Akt., Dwi Cahyo Utomo, SE, MA, Akt., Daljono, SE, M.Si, Akt., dan seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas semua ilmu pengetahuan yang telah diberikan.

5. Kedua orang tua (Siswo, SH dan Dra. Esti Novi M) untuk doa yang tak pernah usai, kasih sayang, cinta dan kesabar yang engakau berikan pada putrimu ini. Tiada kata terindah selain terima kasih yang dapat putrimu berikan. I Love dad and mom Muaacch.
6. Kedua adikku tercinta (Muhammad Bagus N dan Annisa Mukti S) makasi untuk dukungan dan doanya, belajarliah yang rajin dan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua.
7. Keluarga besar Kasman dan Citrodiyoyo terima kasih untuk doa dan perhatian yang kalian berikan kepada saya.
8. Buat Mas Ayib yang jauh nian di Kairo, makasi udah ngembalin semangat ku lagi buat nyelesain skripsi ini, motivator hidup, nemenin aku gila-gilaan buat ngilangin stress, sama2 berjuang untuk masa depan, TOP deh buat mas. Mas ridi, makasi banyak kamu telah membuat aku untuk berpikir lebih dewasa dan bijak dalam bertindak.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan: Good Bye Kitty (Nurul fitria, Ayu Wahdikorin, Novella, Athena, Dini Nur'aeni, Roswita, Endah Adhitya, dan Anindhita) rasanya hampa kalau gak ada kalian, udah mo direpotin dengerin curhatku, ngebolehin aku tdr siang di kos kalian, nebeng makan, kadang-kadang pinjem laptop kalian, dll, tetap semangat buat gapai masa depan.
10. Sahabat-sahabat SMA: AsCaYuRin (Yuliana, Astri, dan Panca), yang telah mewarnai persahabatan dengan canda dan tawa tak lekang oleh waktu.
11. Teman-teman proyek BLU untuk Kode rekening: Fanny dan Syam.

12. Teman-teman diskusi SPSS: Dini manajemen 2006, Okta dan Marisca Akuntansi 2006, makasi banget udah bantu memberikan ilmu dan solusi-solusi masalah dengan data SPSS ku dengan diskusi bersama. Bagaimana jadinya data ku kalau tidak ada kalian yang membantu ku.
13. Teman-teman Ekonomi Akuntansi angkatan 2006 Universitas Diponegoro, Frisca, Iyut, Martha, Ulum, Johan, Riky, Yuniz, oli, Metta yang sering nongkrong bareng di perpustakaan FE ekstensi dan teman-teman lainnya yang menemaniku selama menuntut ilmu. Saya ucapkan terima kasih.
14. Teman-teman KKN Watu Agung periode I 2009 (Kusuma, Endang, Mia, mba Indri, Dian chuniel, dll) makasi doa dan dukungannya. Miss you.
15. Perpustakaan FE Undip dan UPT Perpustakaan Undip yang telah menyediakan semua materi dalam penyusunan skripsi.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semuanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, Mei 2010

Penulis

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Dan katakanlah bekerjalah kamu maka Tuhan dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. QS Al Tawbah : 105

Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik QS al Najm : 31

Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, kedua orang tua dan orang lain.

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali jatuh

You Can If You Think You Can

Buah karya ini kupersembahkan untuk:

- Ayah dan Ibu tercinta
- Dek Bagas dan Dek Utit
- Eyangti Sutarti dan Makti
- Seluruh sahabat-sahabatku

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISIONAL SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	x
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II TELAAH PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Anggaran Daerah	10
2.1.2 Alokasi Anggaran Belanja Daerah.....	13
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	16
2.1.4 Dana Alokasi Umum (DAU)	19
2.2 Penelitian Terdahulu	21
2.3 Kerangka Pemikiran.....	23
2.4 Hipotesis Penelitian.....	24

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah	24
2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah.	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	31
3.1.1 Belanja Daerah.....	31
3.1.2 Pendapatan Asli Daerah.....	32
3.1.3 Dana Alokasi Umum	32
3.2 Populasi dan Sampel	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	34
3.5 Metode Analisis	34
3.5.1 Statistik Deskriptif	35
3.5.2 Uji Asumsi Klasik.....	35
3.5.2.1 Uji Normalitas	36
3.5.2.2 Uji Multikoloniaritas	37
3.5.2.3 Uji Autokolerasi	38
3.5.2.4 Uji Heterokedasitas	38
3.5.3 Model Regresi.....	39
3.5.4 Uji Hipotesis	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	42
4.2 Statistik Deskriptif.....	43
4.2.1 Pendapatan Asli Daerah.....	44
4.2.2 Dana Alokasi Umum.....	44
4.2.3 Belanja Langsung.....	45
4.2.4 Belanja Tidak Langsung	46
4.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik	47

4.3.1 Alokasi Belanja Langsung	47
4.3.1.1 Hasil Uji Normalitas.....	47
4.3.1.2 Hasil Uji Multikoloniaritas.....	49
4.3.1.3 Hasil Uji Autokolerasi.....	50
4.3.1.4 Hasil Uji Heterokedasitas	51
4.3.2 Alokasi Belanja Tidak Langsung.....	52
4.3.2.1 Hasil Uji Normalitas.....	52
4.3.2.2 Hasil Uji Multikoloniaritas.....	54
4.3.2.3 Hasil Uji Autokolerasi.....	55
4.3.2.4 Hasil Uji Heterokedasitas	56
4.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	57
4.4.1 Alokasi Belanja Langsung	57
4.4.2 Alokasi Belanja Tidak Langsung.....	60
4.5 Hasil Pengujian Hipotesis.....	62
4.5.1 Alokasi Belanja Langsung	62
4.5.2 Alokasi Belanja Tidak Langsung.....	64
4.6 Pembahasan Hipotesis	65
4.6.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Daerah.....	65
4.6.1.1 Belanja Langsung	65
4.6.1.2 Belanja Tidak Langsung.....	66
4.6.2 Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Daerah	67
4.6.2.1 Belanja Langsung	67
4.6.2.2 Belanja Tidak Langsung.....	68
BAB V PENUTUP	70
5.1 Kesimpulan	70
5.2 Keterbatasan Penelitian	70

5.3 Saran	70
-----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi	38
Tabel 4.1 Prosedur Penentuan Sampel.....	43
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif.....	43
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	49
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikoloniaritas Belanja Langsung	50
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi Belanja Langsung	51
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i>	54
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikoloniaritas Belanja Tidak Langsung.....	55
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi Belanja Tidak Langsung.....	55
Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi Belanja Langsung	57
Tabel 4.10 Uji F Belanja Langsung	58
Tabel 4.11 Uji T Belanja Langsung	59
Tabel 4.12 Uji Koefisien Determinasi Belanja Tidak Langsung.....	60
Tabel 4.13 Uji F Belanja Tidak Langsung.....	61
Tabel 4.14 Uji T Belanja Tidak Langsung.....	61
Tabel 4.15 Uji T Belanja Langsung	63
Tabel 4.16 Uji T Belanja Tidak Langsung.....	64
Tabel 4.17 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran Pengaruh PAD dan DAU terhadap alokasi belanja daerah di Kab/Kota Jawa Tengah.....	24
Gambar 4.1 Normal <i>Probability Plot</i> Belanja Langsung.....	48
Gambar 4.2 <i>Scatterplot</i> Belanja Langsung	52
Gambar 4.3 Normal <i>Probability Plot</i> Belanja Tidak langsung.....	53
Gambar 4.4 <i>Scatterplot</i> Belanja Tidak langsung	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Realisasi PAD

Lampiran 2 Laporan Realisasi DAU

Lampiran 3 Laporan Realisasi Belanja Daerah tahun 2007

Lampiran 4 Laporan Realisasi Belanja Daerah tahun 2008

Lampiran 5 Laporan Realisasi Belanja Daerah tahun 2009

Lampiran 6 Hasil output SPSS Belanja Langsung dan Statistik Deskriptif

Lampiran 7 Hasil output SPSS Belanja Tidak Langsung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global termasuk di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas. Kedua aspek tersebut menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan negara maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan seluruh aktivitas dan kerja finansial Pemerintah Daerah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2002). Pengamat ekonomi, pengamat politik, investor, hingga rakyat mulai memperhatikan setiap kebijakan dalam pengelolaan keuangan.

Pembiayaan penyelenggaran pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi di lakukan atas beban APBD. Dalam rangka penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lain dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Halim, 2009).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran (Halim, 2002). APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PP No.24 Tahun 2005). Sedangkan menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 dalam Warsito Kawedar, dkk (2008), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah (Halim, 2009).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap daerah berbeda-beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Karena itu terjadi ketimpangan Pendapatan Asli Daerah. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah.

Menurut Halim (2009) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen dari PAD masih belum memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam membiayai kebutuhan pengeluaran daerah sangat kecil dan bervariasi antar daerah, yaitu kurang dari 10% hingga 50%. Sebagian besar wilayah Provinsi dapat membiayai kebutuhan pengeluaran kurang dari 10%. Distribusi pajak antar daerah sangat timpang karena basis pajak antar daerah sangat bervariasi. Peranan pajak dan retribusi daerah dalam pembiayaan yang sangat rendah dan bervariasi terjadi hal ini terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar dalam jumlah penduduk, keadaan geografis (berdampak pada biaya relative mahal) dan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mengakibatkan biaya penyediaan pelayanan kepada masyarakat sangat bervariasi.

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana Pemerintah

Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Transformasi paradigma dalam hal ini terlatak pada aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka mengelalola sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas *vertikal* (kepada Pemerintah) menjadi akuntabilitas *horizontal* (kepada masyarakat di daerah) (Mardiasmo, 2002). Tujuan utama penyelenggaran otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*publick service*) dan memajukan perekonomian daerah.

Dengan adanya otonomi daerah ini berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri, tak terkecuali juga mandiri dalam masalah *financial*. Meski begitu Pemerintah Pusat tetap memberi dana bantuan yang berupa Dana Alokasi Umum (DAU) yang di transfer ke Pemerintah Daerah. Dalam praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional daerah, yang oleh Pemerintah Daerah "dilaporkan" di perhitungan anggaran. Tujuan dari transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Maemunah, 2006).

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut, Pemerintah Daerah mempunyai

sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah (Undang-uundang No.33 Tahun 2004).

Permasalahan Dana Alokasi Umum terletak pada perbedaan cara pandang antara pusat dan daerah tentang Dana Alokasi Umum. Bagi pusat, Dana Alokasi Umum dijadikan instrument *horizontal imbalance* untuk pemerataan atau mengisi *fiscal gap*. Bagi daerah, Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk mendukung kecukupan. Permasalahan timbul ketika daerah meminta Dana Alokasi Umum sesuai kebutuhannya. Di sisi lain, alokasi Dana Alokasi Umum berdasarkan kebutuhan daerah belum bisa dilakukan karena dasar perhitungan *fiscal needs* tidak memadai (terbatasnya data, belum ada standar pelayanan minimum masing-

masing daerah, dan sistem penganggaran yang belum berdasarkan pada standar analisis belanja). Ditambah total pengeluaran anggaran khususnya APBD belum mencerminkan kebutuhan sesungguhnya dan cenderung tidak efisien.

Sumber-sumber Pendapatan Daerah yang diperoleh dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. Warsito, dkk (2008) mengatakan bahwa belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Menurut Halim (2009) belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan

program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Peneliti sebelumnya seperti Mutiara Maemunah (2006) yang meneliti di Sumatra, Bambang Prakosa (2004) yang meneliti di DIY dan Jawa Tengah, Syukriy & Halim (2003) yang meneliti di Jawa dan Bali memperoleh hasil yaitu PAD dan DAU signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Noni Puspita Sari (2009) yang meneliti di Riau memperoleh hasil yaitu DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung. Sedangkan PAD menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Langsung, bahwa PAD secara individual tidak mempengaruhi belanja langsung. Dari hasil peneliti sebelumnya, peneliti ingin meneliti pengaruh PAD dan DAU terhadap alokasi belanja daerah secara lebih mendalam khususnya Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu batas wilayah yang jelas antar daerah merupakan indikator yang dapat mempengaruhi penerimaan PAD dan DAU. Saile (2009) menyatakan bahwa dari 33 provinsi dan 471 kabupaten/kota di Indonesia, hanya sekitar 10 persen yang mempunyai penetapan batas wilayah yang resmi salah satunya adalah provinsi Jawa Tengah. Penentuan batas wilayah sangat penting, sebab dengan adanya batas wilayah antar daerah akan dapat memaksimalkan potensi daerah yang dimilikinya. Adanya batas wilayah yang resmi akan diketahui sejauh mana batas status hukum, tanggung jawab pemerintahan, perpajakan, hingga untuk menentukan luas area guna untuk menghitung potensi sumber daya, kepadatan penduduk hingga dana perimbangan daerah. Sehingga berpengaruh pada berapa besarnya pendapatan ataupun pengeluaran yang terjadi pada daerah tersebut. Hal

inilah yang menjadi pertimbangan penulis memilih Provinsi Jawa Tengah sebagai obyek penelitian.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Novi Pratiwi (2007) yaitu Pengaruh DAU dan PAD terhadap prediksi belanja daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia mengambil periode penelitian 2003-2005 sedangkan peneliti sekarang meneliti Pengaruh PAD dan DAU terhadap alokasi belanja daerah menggunakan periode tahun 2007-2009 dengan sampel Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, relatif lebih sempit daripada peneliti terdahulunya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah.
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi belanja daerah.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan Penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) pada alokasi

Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari tahun 2007 hingga 2009.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan dalam penelitian ini berupa kontribusi empiris, teori dan kebijakan, yaitu (1) kontribusi empiris pada pengaruh DAU dan PAD terhadap alokasi belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; (2) kontribusi kebijakan untuk Memberikan masukan bagi Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam hal penyusunan kebijakan di masa yang akan datang; (3) kontribusi teori, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun sebagai berikut. Terbagi menjadi lima bagian. BAB 1 menjelaskan latar belakang yang mendasari munculnya masalah dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. BAB II membahas mengenai teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori untuk menganalisis dalam penelitian serta menjelaskan penelitian terdahulu yang terkait, menggambarkan kerangka teori dan menarik hipotesis. BAB III menjelaskan metode penelitian yang dipakai dan sampel data yang lebih terperinci. BAB IV memperlihatkan hasil-hasil dari penelitian. BAB V ditutup dengan kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran Daerah

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas Negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan Negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran (Ghozali, 1997).

Berbagai definisi atau pengertian anggaran menurut Djayasinga (2007) dalam Nurul (2008) antara lain:

1. APBD menggambarkan segala bentuk kegiatan Pemerintah daerah dalam mencari sumber-sumber penerimaan dan kemudian bagaimana dana-dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah.
2. APBD menggambarkan perkiraan dan pengeluaran daerah yang diharapkan terjadi dalam satu tahun kedepan yang didasarkan atas realisasinya masa yang lalu.
3. APBD merupakan rencana kerja operasional Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan dalam satuan angka rupiah. APBD

ini merupakan terjemahan secara moneteris dari dokumen perencanaan daerah yang ada dan disepakati yang akan dilaksanakan selama setahun. Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan (BPKP, 2005 dalam Warsito, dkk 2008) sebagai berikut:

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.

2. Disiplin anggaran

Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proposional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu,

perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

Anggaran adalah rencana kegiatan keuangan yang berisi perkiraan belanja yang diusulkan dalam satu periode dan sumber pendapatan yang diusulkan untuk membiayai belanja tersebut. Anggaran merupakan alat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan (Arif, 2002). Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya.

Menurut Susanti (2008) dalam Nurul (2008) menjelaskan bahwa anggaran tidak hanya sebagai rencana keuangan yang menetapkan biaya dan pendapatan pusat pertanggungjawaban dalam suatu perusahaan tetapi juga merupakan alat bagi manajer tingkat atas untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi kinerja dan memotivasi bawahannya. Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber

kekayaan daerah. Sedangkan APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat/DPR (UU Keuangan Negara, 2002).

2.1.2 Alokasi Anggaran Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim, 2002).

Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan Sekretraris Daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh Bagian Keuangan Pemerintah Daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Dedy Haryadi et al, 2001 dalam Pratiwi, 2007).

Menurut penelitian Pambudi (2007) belanja juga dapat dikategorikan menurut karakteristiknya menjadi dua bagian, yaitu: (1) Belanja selain modal (Belanja administrasi umum; Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik; Belanja transfer; Belanja tak terduga). (2) Belanja modal. Secara umum belanja dalam APBD dikelompokkan menjadi lima kelompok (Pambudi,2007), yaitu:

a. Belanja administrasi umum.

Merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis, yaitu:

1. Belanja pegawai merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang/personal yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas atau dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
2. Belanja barang merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
3. Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan dewan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.
4. Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan publik.

b. Belanja operasi, pemeliharaan sarana dan prasarana publik merupakan semua pengeluaran Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok belanja ini meliputi:

1. Belanja pegawai (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk orang/peronal yang berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang bersifat variabel.

2. Belanja barang (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
 3. Belanja perjalanan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk biaya perjalanan pegawai yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik.
 4. Belanja pemeliharaan (Kelompok Belanja Operasi dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Publik) merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan barang daerah yang mempunyai hubungan langsung dengan pelayanan publik.
- c. Belanja modal merupakan pengeluaran Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal dibagi menjadi:
1. Belanja publik, yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum.
 2. Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan langsung oleh aparatur.
- d. Belanja transfer merupakan pengalihan uang dari pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut. Kelompok belanja ini terdiri atas pembayaran:

- a. Angsuran pinjaman.
- b. Dana bantuan.
- c. Dana cadangan.
- e. Belanja tak terduga adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar biasa. Menurut Nurlan (2008) menyatakan bahwa belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Pratiwi, 2007).

Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan

Asli Daerah (PAD). Proporsi Pendapatan Asli Daerah yang rendah, di lain pihak menyebabkan Pemerintah Daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum. Alternatif jangka pendek peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah adalah menggali dari Pendapatan Asli Daerah (Pratiwi, 2007).

Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah. Kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-undang No.34 Tahun 2000 ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP No.66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan ketentuan daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi (Halim, 2009). Menurut Brahmantio (2002) pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu (Halim, 2002):

1. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.
2. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis

pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dirinci menjadi:

- a. Pajak Provinsi. Pajak ini terdiri atas: (i) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, (ii) Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air, (iii) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan (iv) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
 - b. Jenis pajak Kabupaten/kota. Pajak ini terdiri atas: (i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Restoran, (iii) Pajak Hiburan, (iv) Pajak Reklame, (v) Pajak penerangan Jalan, (vi) Pajak pengambilan Bahan Galian Golongan C, (vii) Pajak Parkir.
 - c. Retribusi. Retribusi ini dirinci menjadi: (i) Retribusi Jasa Umum, (ii) Retribusi Jasa Usaha, (iii) Retribusi Perijinan Tertentu.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:
- a. Bagian laba perusahaan milik daerah.
 - b. Bagian laba lembaga keuangan bank.
 - c. Bagian laba lembaga keuangan non bank.
 - d. Bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

2.1.4 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi Dana Alokasi Umum bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi Dana Alokasi Umum yang relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi Dana alokasi Umum relatif besar. Dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009).

Menurut Halim (2009) ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan

adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut ketentuan adalah sebagai berikut (Halim, 2009):

- a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- d. Porsi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. (Bambang Prakosa, 2004).

Dalam UU No.32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemda, Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam. Disamping Dana Perimbangan tersebut,

Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), pembiayaan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Menurut Undang-undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu daerah ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

2.2 Penelitian Terdahulu

Peneliti sebelumnya seperti Mutiara Maemunah (2006) yang meneliti di Sumatra, Bambang Prakosa (2004) yang meneliti di DIY dan Jawa Tengah, Syukriy & Halim (2003) yang meneliti di Jawa dan Bali memperoleh hasil yaitu PAD dan DAU signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Noni Puspita Sari (2009) yang meneliti di Riau memperoleh hasil yaitu DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung. Sedangkan PAD menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Langsung, bahwa PAD secara individual tidak mempengaruhi belanja langsung.

Penelitian dilakukan oleh Bambang Prakosa (2004) pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan DIY. Hasil menunjukkan bahwa sandaran Pemda untuk menentukan jumlah belanja daerah suatu periode berbeda. Dalam tahun bersamaan, PAD lebih dominan dari pada DAU, tetapi untuk satu tahun kedepan, DAU lebih dominan. Munculnya berbagai bentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah mungkin merupakan indikasi untuk “mengimbangi” pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat (salah satunya DAU).

Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada Kabupaten/Kota di pulau Sumatra (Maemunah, 2006). Tujuan Penelitian ini untuk memberikan bukti empiris pada (1) pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Sumatera; (2) kemungkinan terjadinya *flypaper effect* pada belanja pemerintah Kabupaten/Kota di pulau Sumatera; (3) kecenderungan *flypaper effect* menyebabkan peningkatan jumlah belanja daerah; (4) kemungkinan adanya perbedaan *flypaper effect* antara Pemerintah Kabupaten/Kota yang PAD-nya tinggi dengan Pemerintah Kabupaten/kota yang PAD-nya rendah; dan terakhir (5) pengaruh DAU dan PAD pada kategori pengeluaran sektor yang berhubungan langsung dengan publik (belanja bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum).

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, maka ada lima simpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: Pertama, besarnya nilai Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi besarnya belanja daerah (pengaruh positif). Kedua, telah terjadi *flypaper effect* pada belanja

daerah pada Kabupaten/Kota di Sumatera. Ketiga, terdapat pengaruh *flypaper effect* dalam memprediksi belanja daerah periode kedepan. Keempat, tidak terdapat perbedaan terjadinya *flypaper effect* baik pada daerah yang PAD-nya rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi di Kabupaten/Kota di pulau Sumatera. Kelima atau terakhir, tidak terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah bidang Pendidikan, tetapi telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah bidang Kesehatan dan bidang Pekerjaan Umum.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari (2009) menguji Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. Ada tiga simpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: Pertama, DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Kedua, PAD secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja langsung secara parsial. Ketiga, DAU dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung.

2.3 Kerangka Pemikiran

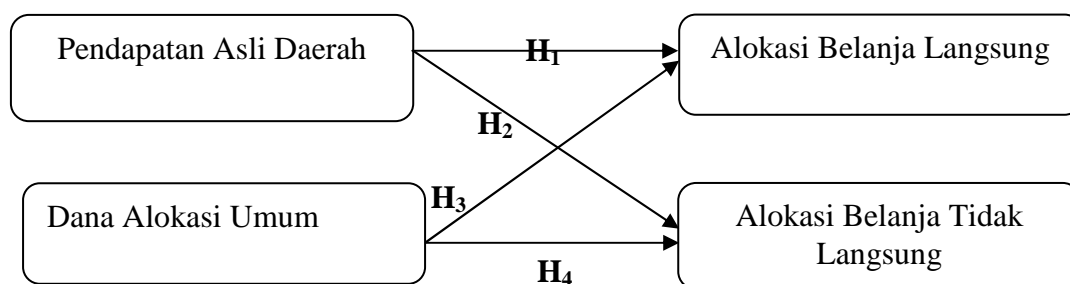
PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung

dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap alokasi belanja daerah di Kabupaten/Kota Jawa Tengah



2.4 Hipotesis Penelitian

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD)

Studi tentang pengaruh pendapatan daerah (*local own resources revenue*) terhadap pengeluaran daerah sudah banyak dilakukan, sebagai contoh penelitian yang pernah dilakukan oleh Bambang Prakosa (2004), Syukriy & Halim (2003) menyatakan pendapatan (terutama pajak) akan memengaruhi Anggaran Belanja

Pemerintah Daerah dikenal dengan nama *tax spend hypothesis*. Dalam hal ini pengeluaran Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan perubahan dalam penerimaan Pemerintah Daerah atau perubahan pendapatan terjadi sebelum perubahan pengeluaran.

Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU 32/2004). Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Colombatto (2001) dalam Syukriy dan Halim (2003) menemukan adanya perbedaan preferensi antara eksekutif dan legislatif dalam pengalokasian *spread* PAD ke dalam belanja sektoral. Alokasi untuk infrastruktur dan DPRD mengalami kenaikan, tapi alokasi untuk pendidikan dan kesehatan justru mengalami penurunan. menduga *power* legislatif yang sangat besar menyebabkan diskresi atas penggunaan *spread* PAD tidak sesuai dengan preferensi publik.

Melihat beberapa hasil penelitian diatas telah menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendaptan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada

Pemerintah Pusat, yang berarti ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah mampu untuk mandiri, dan begitu juga sebaliknya.

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. PAD memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Jadi, PAD berpengaruh terhadap belanja langsung (Puspita Sari, 2009).

H_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung (ABL).

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja tidak langsung, karena belanja tidak langsung dialokasikan untuk membiayai Belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja

Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja tidak tersangka. Peningkatan pendapatan yang diperoleh dari PAD mengalami penambahan karena alokasi belanja tidak langsung cenderung digunakan untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang tiap tahun terjadi kenaikan gaji pegawai, dibanding untuk pengalokasian belanja tidak langsung lainnya . Dengan adanya kenaikan belanja pegawai mengorbankan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.

H₂ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja tidak langsung (ABTL).

2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah (ABD)

Untuk memberikan dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diterbitkan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sumber pembiayaan Pemerintah Daerah didalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan pembantuan. Adapun sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Menurut Vidi (2007) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya di dalam pelaksanaan desentralisasi. Berkaitan dengan dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini untuk member pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Dalam literatur ekonomi dan keuangan daerah, hubungan Pendapatan dan Belanja Daerah didiskusikan secara luas sejak akhir dekade 1950-an dan berbagai hipotesis tentang hubungan diuji secara empiris menyatakan bahwa pendapatan mempengaruhi belanja. Sementara studi tentang pengaruh *grants* dari Pemerintah Pusat terhadap keputusan pengeluaran atau Belanja Pemerintah Daerah sudah berjalan lebih dari 30 tahun (Bambang Prakosa, 2004). Holtz-Eakin, *et al* (1985) dalam Bambang Prakosa (2004) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari Pemerintah Pusat dengan Belanja Pemerintah Daerah.

Melihat beberapa hasil penelitian diatas telah menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Dan Dana Alokasi Umum ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima maka berarti daerah tersebut masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat dalam memenuhi belanjanya, ini menandakan bahwa daerah tersebut belumlah mandiri, dan begitu juga sebaliknya (Pambudi, 2007).

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki

keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal (Puspita Sari, 2009).

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. DAU dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Jaminan keseimbangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu DAU merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping itu tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Jadi, DAU memiliki pengaruh terhadap belanja langsung (Puspita Sari, 2009).

H_3 : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung (ABL) .

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja tidak langsung yang dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan Keuangan kepada

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja tidak tersangka. Setiap tahun terjadi peningkatan belanja tidak langsung disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat yang terus menambah jumlah PNS, serta kenaikan gaji PNS. Dengan demikian Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terlalu signifikan, jika dibandingkan dengan kenaikan gaji pegawai tersebut. Namun didorong kewajiban untuk mengalokasikan belanja hibah sebagai komponen belanja tidak langsung. Sehingga DAU memiliki pengaruh terhadap belanja tidak langsung.

H₄ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja tidak langsung (ABTL).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim, 2002). Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung (Halim, 2009). Belanja Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari tahun 2007 sampai dengan 2009.

Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Rumus untuk menghitung alokasi belanja tidak langsung (ABTL) yaitu:

ABTL = belanja pegawai + belanja bunga + belanja subsidi + belanja hibah +
 belanja bantuan sosial + belanja bagi hasil + bantuan keuangan +
 belanja tidak terduga

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal (Puspita sari, 2009). Rumus untuk menghitung alokasi belanja langsung (ABL) yaitu:

ABL = belanja pegawai + belanja barang dan jasa + belanja modal

3.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Bastian (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dari tahun 2007 sampai dengan 2009. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:

PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah
 yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah

3.1.3 Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah (Halim, 2009). Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh dengan melihat dari Dana

Perimbangan yang ada di Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Penulis dalam penelitian mengambil seluruh populasi dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Kabupaten/kota menyampaikan Laporan Realisasi APBD tahunan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2007 hingga 2009.
- b. Kabupaten/kota mencantumkan data-data mengenai PAD, DAU dan alokasi belanja daerah pada Laporan Realisasi APBD yang digunakan dalam penelitian ini.

Jumlah Kabupaten/Kota menyampaikan Laporan Realisasi APBD Tahun 2007 hingga 2009 kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2007-2009 dengan data penelitian sebanyak 105 daerah, dimana jumlah tersebut diperoleh dengan rumus:

$$N = \text{jumlah daerah} \times \text{periode penelitian}$$

$$N = 35 \times 3 \text{ tahun}$$

$$N = 105$$

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Jawa

Tengah yang diperoleh dari Situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet. Dari laporan Realisasi APBD diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengambilan data sekunder, data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode sensus dengan mengambil seluruh populasi yaitu sebanyak 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

3.5 Metode Analisis

Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Secara umum, pendekatan kuantitatif lebih fokus pada tujuan untuk generalisasi, dengan melakukan pengujian statistik dan steril dari pengaruh subjektif peneliti (Sekaran, 1992). Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

Secara umum, analisis regresi adalah analisis mengenai variabel independen dengan variabel dependen yang bertujuan untuk mengestimasi nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Gujarati, 2003). Teknik yang digunakan untuk mencari nilai persamaan regresi

yaitu dengan analisis *Least Squares* (kuadrat terkecil) dengan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan.

Dalam analisis regresi selain mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, juga menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen, sehingga dapat membedakan variabel independen dengan variabel dependen tersebut (Ghozali, 2006). Dimana dalam penelitian ini, dua komponen dari pendapatan daerah yaitu PAD, dan DAU sebagai variabel independen, akan dianalisis pengaruhnya terhadap alokasi belanja daerah yang diukur dengan belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagai variabel dependen.

Beberapa langkah yang dilakukan dalam analisis regresi linier masing-masing akan dijelaskan di bawah ini:

3.5.1 Statistik Deskriptif

Penyajian statistik deskriptif bertujuan agar dapat dilihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan alokasi belanja daerah.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum

melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

3.5.2.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan analisis grafik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik terbesar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2006).

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov* (K-S). Jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan diatas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *Kolmogrov-Smirnov* menunjukkan nilai signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2006).

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Uji multikolonieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolonieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$).

Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* <0,10 atau sama dengan nilai *VIF*>10 (Ghozali, 2006).

3.5.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Jika ada masalah autokorelasi, maka model regresi yang seharusnya signifikan, menjadi tidak layak untuk dipakai (Singgih Santoso, 2000).

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin Watson*. Singgih (2000), bila angka D-W diantara -2 samapai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test)

Tabel 3.1

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tdk ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tdk ada autokorelasi positif	No decision	$dl \leq d \leq du$
Tdk ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tdk ada autokorelasi negatif	No decision	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tdk ada autokorelasi, positif atau negatif	Tdk ditolak	$du < d < 4 - du$

Sumber: Imam Ghozali, 2006

3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali,2006).

3.5.3 Model Regresi

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda linier yang digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan yaitu PAD dan DAU terhadap pengeluaran pemerintah yang berupa alokasi belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung). Data diolah dengan bantuan *software* SPSS seri 16.00.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen (sekarana, 1992). Ada dua persamaan regresi, persamaan regresi adalah:

$$Y_1 = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e_1$$

dan

$$Y_2 = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e_2$$

dimana :

Y_1 = Belanja Langsung

Y_2 = Belanja Tidak Langsung

X_1 = PAD

$$X_2 = \text{DAU}$$

$\beta_1 \beta_2$ = koefisien regresi untuk masing-masing variabel X

3.5.4 Uji Hipotesis

Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of Fit*nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima (Ghozali, 2006).

1. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2006).

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka hipotesis alternatif diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi.

Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Apabila nilai t hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai t tabel maka berarti t hitung tersebut signifikan artinya hipotesis alternatif diterima yaitu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima apabila $p\text{-value} < 5\%$ (Ghozali, 2006).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Jumlah Pemerintah Daerah di Propinsi Jawa Tengah sendiri berjumlah 35 Pemerintah Kabupaten/Kota. Propinsi Jawa Tengah merupakan Propinsi yang terletak ditengah pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Propinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang menjadi objek dalam penelitian adalah 35 Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

- | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Kab.Banjarnegara | 13. Kab. Kendal | 25. Kab.Sukoharjo |
| 2. Kab. Banyumas | 14. Kab.Klaten | 26. Kab. Tegal |
| 3. Kab.Batang | 15. Kab.Kudus | 27. Kab.Temanggung |
| 4. Kab. Blora | 16. Kab. Magelang | 28. Kab.Wonogiri |
| 5. Kab.Boyolali | 17. Kab.Pati | 29. Kab.Wonosobo |
| 6. Kab.Brebes | 18. Kab. Pekalongan | 30. Kota Magelang |
| 7. Kab.Cilacap | 19. Kab.Pemalang | 31. Kota Pekalongan |
| 8. Kab.Demak | 20. Kab.Purbalingga | 32. Kota Salatiga |
| 9. Kab.Grobogan | 21. Kab. Purworejo | 33. Kota Semarang |
| 10. Kab.Jepara | 22. Kab. Rembang | 34. Kota Surakarta |
| 11. Kab. Karanganyar | 23. Kab. Semarang | 35. Kota Tegal |
| 12. Kab. Kebumen | 24. Kab.Sragen | |

Data pada penelitian ini (n) sebanyak 102, data didapatkan dari laporan realisasi APBD Tahun 2007 hingga 2009 yang seluruhnya menyampaikan laporan kepada situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2007 hingga 2009, yang mencantumkan data-data mengenai PAD, DAU dan alokasi belanja daerah. Setelah dilakukan *screening* data, maka dapat diketahui terdapat data outlier pada penelitian. Data outlier yang mempunyai karakteristik unik. Agar tidak mengganggu pengujian dalam penelitian ini, maka data outlier peneliti keluarkan dari sampel.

Tabel 4.1
Prosedur Penentuan Sampel

Prosedur Penentuan Sampel	Jumlah
1. Laporan Realisasi APBD 2007-2009	105
2. Data outlier	(3)
Total sampel yang dapat digunakan	102

4.2 Statistik Deskriptif

Dari hasil pengumpulan data sekunder mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan alokasi belanja daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2007-2009, maka statistik deskriptif yaitu minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi variabel penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	102	21.757	106.759	52.18135	17.580021
DAU	102	212.614	782.157	493.75725	132.304171
B.insng	102	125.030	423.036	267.75752	62.174154
B.tdk.Lngsng	102	140.850	877.046	464.37799	151.871334
Valid N (listwise)	102				

Sumber: Data yang diolah, 2010 (dalam jutaan rupiah)

4.2.1 Pendapatan Asli Daerah

- a. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp 21.757.000,00. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah terendah di Jawa Tengah diperoleh dari kota Pekalongan pada tahun 2008. Oleh karena itu Kota Pekalongan masih sangat tergantung dengan Pemerintah Pusat untuk membiayai belanja daerahnya, sehingga Kota Pekalongan harus meningkatkan PAD dengan menggali terus sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya sendiri baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi.
- b. .Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai maksimum sebesar Rp 106.759.000,00. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah tertinggi di Jawa Tengah diperoleh dari kota Surakarta pada tahun 2009. Oleh karena itu dengan tingginya PAD Kota Surakarta memiliki kemandirian otonomi daerah lebih besar dalam membiayai pembangunan daerah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
- c. .Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata (mean) selama tiga tahun sebesar Rp 52.181.350,00.
- d. .Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 17.580.021,00 lebih kecil dari mean Rp 52.181.350,00 menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

4.2.2 Dana Alokasi Umum

- a. Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum sebesar Rp 212.614.000,00. Hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Umum

terendah di Jawa Tengah diperoleh dari Kota Salatiga di tahun 2007. Ini membuktikan Kota Salatiga dengan wilayah daerah yang tidak begitu luas bisa mandiri dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah.

- b. Dana Alokasi Umum memiliki nilai maksimum sebesar Rp 782.157.000,00. Hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Umum tertinggi di Jawa tengah diperoleh dari Kabupaten Cilacap di tahun 2009. Ini membuktikan Kota Cilacap masih sangat tergantung terhadap Pemerintah Pusat.
- c. Dana Alokasi Umum memiliki nilai rata-rata (mean) selama tiga tahun sebesar Rp 493.757.250,00.
- d. Dana Alokasi Umum memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 132.304.171,00 lebih kecil dari mean Rp 493.757.250,00 menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

4.2.3 Belanja Langsung

- a. Belanja langsung daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp 125.030.000,00. Hasil penelitian menunjukkan Belanja Langsung terendah di Jawa Tengah diperoleh dari Kota Salatiga pada tahun 2007. Ini membuktikan Kota Salatiga dengan wilayah daerah yang tidak begitu luas dan jumlah penduduknya sedikit dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat membiayai belanja langsung daerahnya dengan dana sebesar Rp 125.030.000,00.
- b. Belanja langsung memiliki nilai maximum sebesar Rp 423.036.000,00. Hasil penelitian menunjukkan Belanja Langsung tertinggi di Jawa Tengah

diperoleh dari Kab. Pati pada tahun 2008. Ini membuktikan Kota Pati dalam mengalokasikan sebagian besar biayanya untuk belanja langsung kegiatan pembangunan daerah.

- c. Belanja langsung memiliki nilai rata-rata (mean) selama tiga tahun sebesar Rp 267.757.520,00.
- d. Belanja langsung memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 62.174.154,00 lebih kecil dari mean sebesar Rp 267.757.520,00 menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

4.2.4 Belanja Tidak Langsung

- a. Belanja tidak langsung memiliki nilai minimum sebesar Rp 140.850.000,00. Hasil penelitian menunjukkan Belanja Tidak Langsung terendah di Jawa Tengah diperoleh dari kota Tegal pada tahun 2007. Ini membuktikan Kota Tegal dalam mengalokasikan belanja daerahnya hanya sebagian kecil untuk belanja tidak langsung dan sebagian besar dialokasikan untuk belanja langsung, sehingga dapat mempercepat proses pembangunan daerah tersebut.
- b. Belanja tidak langsung memiliki nilai maksimum sebesar Rp 877.046.000,00. Hasil penelitian menunjukkan Belanja Tidak Langsung tertinggi di Jawa Tengah diperoleh dari kota Salatiga pada tahun 2008. Ini membuktikan bahwa Kota Salatiga mengalokasikan belanja daerah sebagian besar anggaran hanya untuk belanja tidak langsung. Hal ini merupakan pemborosan, seharusnya lebih besar untuk membiayai belanja langsung.

- c. Belanja tidak langsung memiliki nilai rata-rata (mean) selama tiga tahun sebesar Rp 464.377.990,00.
- d. Belanja tidak langsung memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 151.871.334,00 lebih kecil dari mean sebesar Rp 464.377.990,00 menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

4.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian selanjutnya adalah uji asumsi klasik pada data. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji *Kolmogorov Smirnov*, uji multikolinearitas, uji autokolerasi, uji heteroskedasitas. Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik.

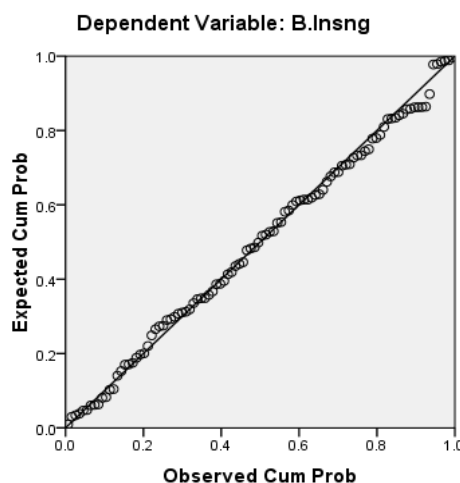
4.3.1 Alokasi Belanja Langsung

4.3.1.1 Hasil Uji Normalitas

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

Gambar 4.1
Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data yang diolah, 2010

Berdasarkan keterangan grafik di atas, titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas grafik dapat menyesatkan jika tidak berhati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik belum tentu normal. Oleh karena itu dilakukan pengujian statistik dengan cara melakukan uji *one sample tes Kolmogrov-Smirnov*. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2006).

Tabel 4.3
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PAD	DAU
N		102	102
Normal Parameters ^a	Mean	5.21814E1	4.93757E2
	Std. Deviation	1.758002E1	1.323042E2
Most Extreme Differences	Absolute	.081	.075
	Positive	.081	.075
	Negative	-.044	-.073
Kolmogorov-Smirnov Z		.820	.762
Asymp. Sig. (2-tailed)		.512	.606

a. Test distribution is Normal.

b. calculated from data.

Sumber data diolah, 2010

Nilai K-S untuk variabel PAD 0,820 dengan probabilitas signifikansi 0,512 dengan nilai lebih besar $\alpha=0,05$ hal ini berarti hipotesis nol tidak dapat ditolak atau data terdistribusi normal. Nilai K-S variabel DAU 0,762 dengan probabilitas signifikansi 0,606 yang berarti hipotesis nol tidak dapat ditolak atau data terdistribusi normal.

4.3.1.2 Hasil Uji Multikoloniaritas

Uji Multikoloniaritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Uji multikoloniaritas dapat dilaksanakan menggunakan model regresi dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai tolerance value diatas 0,10 atau nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) dibawah 10 maka tidak terjadi multikoloniaritas (Ghozali, 2006). Hasil uji multikoloniaritas pada tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	100.935	19.091		5.287	.000		
	PAD	1.325	.292	.375	4.545	.000	.810	1.235
	DAU	.198	.039	.421	5.106	.000	.810	1.235

a. Dependent Variable: B.Insng

Sumber data diolah, 2010

Berdasarkan **Tabel 4.4** tersebut di atas terlihat bahwa seluruh variabel independen yaitu PAD dan DAU memiliki angka *Variance Inflation Factors* (VIF) di bawah 10 dengan angka *tolerance* yang menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

4.3.1.3 Hasil Uji Autokolerasi

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin-Watson. Singgih (2000), bila angka D-W diantara -2 samapai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Menurut Ghazali (2006) uji autokorelasi dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat autokorelasi antara error yang terjadi antar periode yang diujikan dalam model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi harus dilihat nilai uji D-W.

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokolerasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.675 ^a	.455	.444	46.349560	2.112

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: B.Insng

Sumber data diolah, 2010

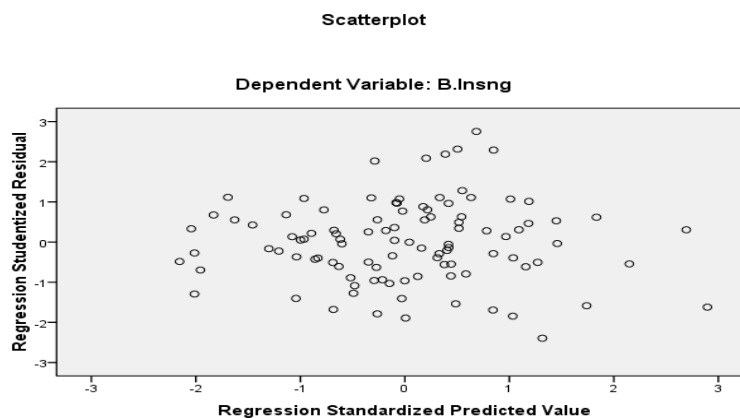
Nilai DW sebesar 2,112, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel 102 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k=2). Nilai DW 2,112 lebih besar dari batas atas (du) 1,71 dan kurang dari 2,28 (4-du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak bisa menolak H₀ yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif atau negatif (sesuai tabel keputusan) atau dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.

4.3.1.4 Hasil Uji Heterokedasitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedasitas atau tidak terjadi Heteroskedisitas karena data *crosssection* mengandung berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar) (Ghozali, 2006).

Di dalam pengujian heteroskedasitas pada penelitian ini didasarkan pada Scatterplot. Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh grafik *Scatterplot* sebagai berikut:

Gambar 4.2
Scatterplot



Sumber: Data yang diolah, 2010

Berdasarkan grafik *scatterplot* terlihat titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

4.3.2 Alokasi Belanja Tidak Langsung

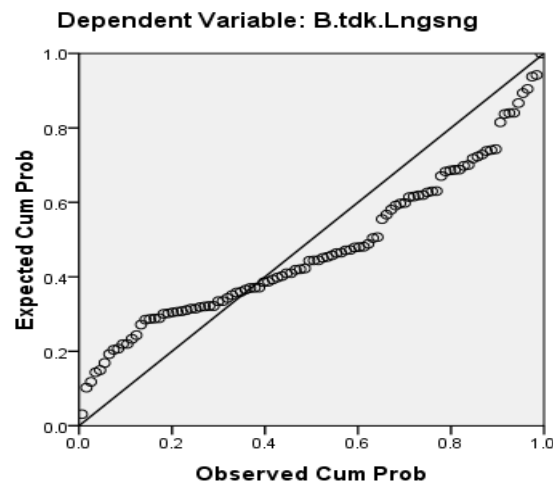
4.3.2.1 Hasil Uji Normalitas

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Namun demikian hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan

dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal.

Gambar 4.3
Normal Probability Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data yang diolah, 2010

Berdasarkan keterangan grafik di atas, grafik normal plot terlihat titik menyebar disekitar garis diagonal, serta penyebarannya agak menjauhi garis diagonal. Grafik ini menunjukkan bahwa model regresi menyalahi asumsi normalitas atau model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas grafik dapat menyesatkan jika tidak berhati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik belum tentu normal. Oleh karena itu dilakukan pengujian statistik dengan cara melakukan uji *one sample tes Kolmogrov-Smirnov*. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji *Kolmogorov-Smirnov* lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2006).

Hasil uji *Kolmogrov-Smirnov* dapat dilihat pada tabel 4.6. Nilai K-S untuk variabel PAD 0,820 dengan probabilitas signifikansi 0,512 dengan nilai lebih dari $\alpha=0,05$ hal ini berarti hipotesis nol tidak dapat ditolak atau data terdistribusi normal. Nilai K-S variabel DAU 0,762 dengan probabilitas signifikansi 0,606 yang berarti hipotesis nol tidak dapat ditolak atau data terdistribusi normal.

Tabel 4.6
Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PAD	DAU
N		102	102
Normal Parameters ^a	Mean	5.21814E1	4.93757E2
	Std. Deviation	1.758002E1	1.323042E2
Most Extreme Differences	Absolute	.081	.075
	Positive	.081	.075
	Negative	-.044	-.073
Kolmogorov-Smirnov Z		.820	.762
Asymp. Sig. (2-tailed)		.512	.606

a. Test distribution is Normal.

b. calculated from data

Sumber data diolah, 2010

4.3.2.2 Hasil Uji Multikoloniaritas

Uji Multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Uji multikolinearitas dapat dilaksanakan menggunakan model regresi dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai tolerance value diatas 0,10 atau nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2006). Hasil uji multikolinearitas pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Tabel Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-25.606	35.398		-.723	.471		
PAD	1.043	.541	.121	1.930	.050	.810	1.235
DAU	.882	.072	.768	12.279	.000	.810	1.235

a. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng

Sumber: Data yang diolah, 2010

Berdasarkan **Tabel 4.7** tersebut di atas terlihat bahwa seluruh variabel independen yaitu PAD dan DAU memiliki angka *Variance Inflation Factors* (VIF) di bawah 10 dengan angka tolerance yang menunjukkan nilai lebih dari 0,1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

4.3.2.3 Hasil Uji Autokorelasi

Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Durbin Watson*. Singgih (2000), bila angka D-W diantara -2 samapai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi. Menurut Ghozali (2006), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test).

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.828 ^a	.686	.680	85.942687	1.802

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng

Sumber data diolah, 2010

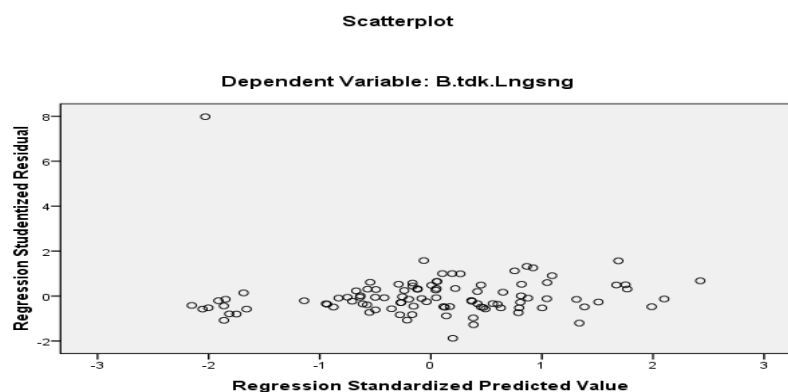
Nilai DW sebesar 1,802, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel 102 (n) dan jumlah variabel independen 2 (k=2). Nilai DW 1,802 lebih besar dari batas atas (du) 1.71 dan kurang dari 2,28 (4-du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak bisa menolak H_0 yang menyatakan tidak ada autokorelasi positif atau negatif (sesuai tabel keputusan) atau dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi.

4.3.2.4 Hasil Uji Heterokedasitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedasitas atau tidak terjadi Heteroskedisitas karena data *crosssection* mengandung berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar) (Ghozali, 2006).

Di dalam pengujian heteroskedasitas pada penelitian ini didasarkan pada *Scatterplot*. Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh grafik *Scatterplot* sebagai berikut:

Gambar 4.4



Sumber: Data yang diolah, 2010

Berdasarkan grafik *Scatterplot* terlihat titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

4.4 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

4.4.1 Alokasi Belanja Langsung

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 16.00 for windows adalah sebagai berikut:

1. Koefisien Determinasi

Hasil nilai *adjusted R-Square* dari regresi digunakan untuk mengetahui besarnya struktur modal yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya.

Tabel 4.9

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.675 ^a	.455	.444	46.349560

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: B.Insng

Sumber: Data yang diolah, 2010

Pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *adjusted R²* sebesar 0,444 hal ini berarti 44,4% variasi belanja langsung dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen yaitu PAD dan DAU. Sedangkan sisanya (100% - 44,4% = 55,6 %) dijelaskan sebab yang lain diluar model.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian simultan diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.10

Uji F

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	177748.287	2	88874.143	41.370	.000 ^a
	Residual	212679.887	99	2148.282		
	Total	390428.174	101			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: B.Insng

Sumber: Data yang diolah, 2010

Tabel 4.10 menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F sebesar 41,370 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja langsung. Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja langsung.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Untuk menentukan pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel tergantung di gunakan uji t. Dari hasil pengujian analisis regresi sebagaimana pada lampiran diketahui nilai t hitung sebagai berikut :

Tabel 4.11
Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	100.935	19.091		5.287	.000		
PAD	1.325	.292	.375	4.545	.000	.810	1.235
DAU	.198	.039	.421	5.106	.000	.810	1.235

a. Dependent Variable: B.lnsng

Sumber: Data yang diolah, 2010

Hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa dua variabel yang dimasukkan dalam model signifikan mempengaruhi alokasi belanja daerah. Variabel tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Kedua variabel tersebut menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,000 dan 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05.

Hasil estimasi model dapat ditulis dalam persamaan di bawah ini:

$$\text{Alokasi belanja langsung} = 100,935 + 1,325\text{PAD} + 0,198\text{DAU}$$

Persamaan tersebut dapat di artikan:

- Konstanta sebesar 100,935 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen dianggap konstan ($X_1=0$, $X_2=0$), maka alokasi belanja langsung tiap daerah sebesar 100,935.
- Koefisien regresi PAD bertambah positif sebesar 1,325, artinya apabila terjadi perubahan DAU sebesar 1% akan menaikkan belanja langsung sebesar 1,325 atau 13,25%.

- Koefisien regresi DAU bertambah positif sebesar 0,198, artinya apabila terjadi perubahan variabel DAU sebesar 1% akan menaikkan belanja langsung sebesar 0,198 atau 19,8%.

4.4.2 Alokasi Belanja Tidak Langsung

Hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS 16.00 for windows adalah sebagai berikut:

1. Koefisien Determinasi

Hasil nilai *adjusted R-Square* dari regresi digunakan untuk mengetahui besarnya struktur modal yang dipengaruhi oleh variabel-variabel bebasnya.

Tabel 4.12

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.828 ^a	.686	.680	85.942687

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng

Sumber: Data yang diolah, 2010

Pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai *adjusted R²* sebesar 0,680 hal ini berarti 68% variasi belanja langsung dapat dijelaskan oleh variasi dari kedua variabel independen yaitu PAD dan DAU. Sedangkan sisanya (100% - 68% = 32%) dijelaskan sebab yang lain diluar model.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian simultan diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4.13
Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1598326.725	2	799163.363	108.198	.000 ^a
	Residual	731228.397	99	7386.145		
	Total	2329555.122	101			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng

Sumber: Data yang diolah, 2010

Tabel 4.13 menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F sebesar 108.198 dengan probabilitas 0,000. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen PAD dan DAU berpengaruh secara signifikan terhadap variabel belanja tidak langsung. Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja tidak langsung.

3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Untuk menentukan pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel tergantung di gunakan uji t. Dari hasil pengujian analisis regresi sebagaimana pada lampiran diketahui nilai t hitung sebagai berikut :

Tabel 4.14
Uji T
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-25.606	35.398		-.723	.471		
	PAD	1.043	.541	.121	1.930	.050	.810	1.235
	DAU	.882	.072	.768	12.279	.000	.810	1.235

a. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng

Sumber: Data yang diolah, 2010

Hasil perhitungan statistik tersebut menunjukkan bahwa dua variabel yang dimasukkan dalam model signifikan mempengaruhi alokasi belanja daerah. Variabel tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Kedua variabel tersebut menunjukkan tingkat signifikan sebesar 0,050 dan 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05.

Hasil estimasi model dapat ditulis dalam persamaan di bawah ini:

$$\text{Alokasi belanja tidak langsung} = -25,606 + 1,043\text{PAD} + 0,882\text{DAU}$$

Persamaan tersebut dapat di artikan:

- Konstanta sebesar -25,606 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen dianggap konstan ($X_1=0$, $X_2=0$), maka alokasi belanja langsung tiap daerah sebesar -25,606.
- Koefisien regresi PAD bertambah positif sebesar 1,043, artinya apabila terjadi perubahan DAU sebesar 1% akan menaikkan belanja langsung sebesar 1,043 atau 10,43%.
- Koefisien regresi DAU bertambah positif sebesar 0,882, artinya apabila terjadi perubahan variabel DAU sebesar 1% akan menaikkan belanja langsung sebesar 0,882 atau 88,2%.

4.5 Hasil Pengujian Hipotesis

4.5.1 Alokasi Belanja Langsung

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

Tabel 4.15
Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	100.935	19.091		5.287	.000
PAD	1.325	.292	.375	4.545	.000
DAU	.198	.039	.421	5.106	.000

a. Dependent Variable: B.Insng

Sumber: Data yang diolah, 2010

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung (abl).

Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendaptan Asli Daerah secara individual mempengaruhi belanja langsung, dan dapat disimpulkan hipotesis 1 diterima.

H₃ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung (abl).

Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Dana Alokasi Umum sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum

berpengaruh secara individual mempengaruhi belanja langsung, dan dapat disimpulkan hipotesis 3 diterima.

4.5.2 Alokasi Belanja Tidak Langsung

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006).

Tabel 4.16
Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-25.606	35.398		-.723	.471
PAD	1.043	.541	.121	1.930	.050
DAU	.882	.072	.768	12.279	.000

a. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng

Sumber: Data yang diolah, 2010

Berdasar tabel diatas dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sebagai berikut:

H₂ : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (abtl).

Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,050. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendaptan Asli Daerah secara individual sangat mempengaruhi belanja langsung, dan dapat disimpulkan hipotesis 2 diterima.

H₄ : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (abtl).

Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Pada output regresi menunjukkan bahwa angka signifikansi untuk variabel Dana Alokasi Umum sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh secara individual mempengaruhi belanja tidak langsung, dan dapat disimpulkan hipotesis 4 diterima.

Tabel 4.17

Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No.	Hipotesis	Hasil Uji
H ₁	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung (abl).	Diterima
H ₂	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (abtl).	Diterima
H ₃	Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung (abl).	Diterima
H ₄	Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (abtl).	Diterima

4.6 Pembahasan Hipotesis

4.6.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan alokasi belanja daerah

4.6.1.1 Belanja Langsung

Hipotesis pertama menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung (abl)". Hasil pengujian

statistik menunjukkan tingkat signifikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja langsung. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh lilik khoirul mala dan Dwi Asti Septiana (2008), yang menemukan bahwa secara parsial PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Dengan pemahaman bahwa apabila belanja modal menurun maka dapat dipastikan bahwa belanja langsung juga akan menurun karena belanja modal merupakan bagian dari pada belanja langsung.

Pernyataan Friedmen (1978) dalam Bambang Prakosa (2004) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil daerah itu sendiri, misalnya Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah (Mardiasmo, 2002). Seperti yang di ketahui belanja langsung merupakan bagian dari belanja daerah. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka akan semakin besar pula dana yang harus di salurkan lewat belanja langsung untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah.

4.6.1.2 Belanja Tidak Langsung

Hipotesis kedua menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (abtl)". Hasil

pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,05 sama dengan tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja tidak langsung. Penulis belum menemukan peneliti terdahulu tentang pengaruh PAD terhadap belanja tidak langsung. Namun penulis hanya menemukan penelitian terdahulu oleh Maemunah (2006) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Seperti yang di ketahui belanja tidak langsung merupakan bagian dari belanja daerah.

Pernyataan Friedmen (1978) dalam Bambang Prakosa (2004) menyatakan bahwa kenaikan dalam pajak akan meningkatkan belanja daerah sehingga akhirnya akan memperbesar defisit. Hal ini disebabkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil daerah itu sendiri, misalnya Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain Pendapatan Yang Sah (Mardiasmo, 2002). Seperti yang di ketahui belanja tidak langsung merupakan bagian dari belanja daerah. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka akan semakin besar pula dana yang harus di salurkan lewat belanja tidak langsung untuk melaksanakan program-program pemerintah.

4.6.2 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan alokasi belanja daerah

4.6.2.1 Belanja Langsung

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa "Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung (abl)". Hasil pengujian

statistik menunjukkan tingkat signifikan Dana Alokasi Umum sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja langsung. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari dan Idhar Yahya (2009) dalam Puspita Sari (2009), yang menemukan bahwa secara parsial DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Dengan pemahaman bahwa apabila belanja modal menurun maka dapat dipastikan bahwa belanja langsung juga akan menurun karena belanja modal merupakan bagian dari pada belanja langsung.

Pernyataan Abdul Halim (2009) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal yang bertujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Sesuai dengan hasil penelitian di atas, maka semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat, maka akan semakin tinggi pula alokasi belanja langsung.

4.6.2.2 Belanja Tidak Langsung

Hipotesis keempat menyatakan bahwa "Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (abtl)". Hasil pengujian statistik menunjukkan tingkat signifikan Dana Alokasi Umum sebesar 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05 sehingga dapat membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja tidak langsung. Penulis belum menemukan peneliti terdahulu tentang pengaruh DAU terhadap belanja tidak

langsung. Namun penulis hanya menemukan penelitian terdahulu oleh Maemunah (2006) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini mendukung dari pada hasil penelitian Maemunah (2006) adalah DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Seperti yang di ketahui belanja tidak langsung merupakan bagian dari belanja daerah.

Pernyataan Abdul Halim (2009) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal yang bertujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat, maka akan semakin tinggi pula alokasi belanja tidak langsung.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki PAD tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.
2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki DAU tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja daerahnya juga semakin tinggi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti hanya mengambil 2 variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.
2. Periode penelitian ini dibatasi hanya dari tahun 2007, 2008 sampai dengan tahun 2009.

5.3 Saran

1. Untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baik secara intensifikasi maupun extensifikasi untuk meningkatkan pendapatan daerah, demikian juga Pemerintah Daerah agar terus

mengupayakan untuk bisa menarik Dana Alokasi Umum semaksimal mungkin.

2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbanyak sensus yang digunakan agar hasilnya lebih representatif terhadap populasi yang dipilih. Dan mengambil sampel selain kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya, maupun variabel non-keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro-ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Bahtiar. 2002. *Akuntansi pemerintahan*. Penerbit. Salemba 4: Jakarta.
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit. Salemba 4: Jakarta.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit PT. Indeks: Jakarta.
- Darwanto dan Yustikasari, Yulia, *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal*, Makalah disajikan pada Seminar Antarbangsa di Universitas Hassanudin, Makassar, 26-28 Juli 2007.
- Ghozali, Imam, Arifin Sabeni. 1997. *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*. Edisi 4. Penerbit BPFE: Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta.
- Isdijoso, Brahmantio, *ANALISIS KEBIJAKAN FISKAL PADA ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)*, Kajian Ekonomi Dan Keuangan Vol. 6 No. 1, 2002.
- Kawedar, Warsito, Abdul Rohman, dan Sri Handayani. 2007. *Akuntansi Sektor Publik: Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit UNDIP: Semarang.
- Maimunah, Mutiara. (2006). *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera*. Simposium Nasional Akuntansi IX. Padang.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen keuangan daerah*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Pratiwi, Novi. 2007. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.

Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung*. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Safitri, Nurul Aisyiyah. 2008. *Analisis Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sebelum dan Sesudah PEMBERLAKUAN PEMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus*. Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UNDIP: Semarang.

Singgih, Santoso. 2000. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Sekaran, Uman, *Research Method for Business : A skill Building Approach*, 7th Edition, New York: John Wiley and Sons, 2002.

Sukriy dan Halim Abdullah (c), *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali*, Simposium Nasional Akuntansi VI:1140-1159, Surabaya 16-17 Oktober 2003.

Triwidodo, Pambudi. 2007. *Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Bali*. Skripsi Sarjana (dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UII: Yogyakarta.

Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.

_____. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29/2002 *tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksana Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD*.

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

_____. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.

_____. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.

<http://www.bpkp.go.id>

<http://www.bppk.depkeu.go.id/index.php/2008050879/jurnalakuntansipemerintah>

Realisasi APBD Tahun 2007-2009 Total Se-provinsi Jawa Tengah dalam:

www.djpk.depkeu.go.id

Lampiran 1
Laporan Realisasi PAD

No.	Daerah	PAD		
		2007	2008	2009
1	Kab. Banjarnegara	36.524	41.909	49.599
2	Kab. Banyumas	83.305	89.086	101.414
3	Kab. Batang	25.614	29.990	36.518
4	Kab. Blora	30.732	45.377	50.000
5	Kab. Boyolali	43.201	53.787	65.124
6	Kab. Brebes	34.121	45.819	65.081
7	Kab. Cilacap	63.269	71.290	100.784
8	Kab. Demak	29.903	32.271	41.866
9	Kab. Grobogan	39.096	44.648	46.891
10	Kab. Jepara	53.900	55.951	72.718
11	Kab. Karanganyar	48.716	54.224	64.017
12	Kab. Kebumen	50.752	53.940	61.130
13	Kab. Kendal	52.394	60.462	62.627
14	Kab. Klaten	40.776	51.335	59.156
15	Kab. Kudus	52.727	56.442	71.405
16	Kab. Magelang	60.388	70.945	69.555
17	Kab. Pati	55.576	57.506	70.624
18	Kab. Pekalongan	31.523	41.228	48.132
19	Kab. Pemasang	45.047	51.928	53.659
20	Kab. Purbalingga	43.770	56.222	68.866
21	Kab. Purworejo	39.899	39.591	47.481
22	Kab. Rembang	51.050	47.343	56.755
23	Kab. Semarang	63.804	69.439	90.188
24	Kab. Sragen	50.591	54.013	57.450
25	Kab. Sukoharjo	37.533	43.082	45.132
26	Kab. Tegal	50.598	52.751	67.133
27	Kab. Temanggung	34.987	36.697	39.993
28	Kab. Wonogiri	42.735	41.529	60.943
29	Kab. Wonosobo	26.553	31.513	45.003
30	Kota Magelang	28.720	33.989	49.374
31	Kota Pekalongan	22.447	21.757	22.545
32	Kota Salatiga	30.425	34.301	38.991
33	Kota Semarang	231.884	236.882	259.411
34	Kota Surakarta	86.345	95.039	106.759
35	Kota Tegal	58.870	59.021	65.269

(dalam jutaan rupiah)

Lampiran 2**Laporan Realisasi DAU**

No.	Daerah	DAU		
		2007	2008	2009
1	Kab. Banjarnegara	452.544	488.707	504.765
2	Kab. Banyumas	654.154	702.152	735.161
3	Kab. Batang	362.659	401.575	416.413
4	Kab. Blora	447.775	478.260	487.316
5	Kab. Boyolali	528.784	571.498	586.021
6	Kab. Brebes	657.982	716.426	716.603
7	Kab. Cilacap	671.263	754.599	782.157
8	Kab. Demak	438.288	483.239	488.814
9	Kab. Grobogan	563.699	615.030	614.891
10	Kab. Jepara	461.230	505.642	522.070
11	Kab. Karanganyar	459.156	506.156	517.670
12	Kab. Kebumen	585.365	616.395	638.804
13	Kab. Kendal	453.755	490.895	512.809
14	Kab. Klaten	694.207	744.677	726.192
15	Kab. Kudus	421.953	460.541	471.869
16	Kab. Magelang	548.521	588.002	596.438
17	Kab. Pati	559.748	603.264	621.169
18	Kab. Pekalongan	411.159	465.324	475.256
19	Kab. Pemasang	530.443	561.313	577.865
20	Kab. Purbalingga	416.181	450.743	462.110
21	Kab. Purworejo	471.735	515.796	526.630
22	Kab. Rembang	361.876	398.411	407.159
23	Kab. Semarang	455.990	493.166	508.705
24	Kab. Sragen	513.575	551.266	551.913
25	Kab. Sukoharjo	460.662	498.936	509.733
26	Kab. Tegal	550.407	606.452	624.992
27	Kab. Temanggung	389.124	421.056	430.276
28	Kab. Wonogiri	556.870	598.933	614.599
29	Kab. Wonosobo	389.518	427.667	431.743
30	Kota Magelang	235.917	256.525	256.734
31	Kota Pekalongan	235.899	264.052	265.366
32	Kota Salatiga	212.614	225.385	236.696
33	Kota Semarang	586.736	634.864	687.629
34	Kota Surakarta	374.500	420.912	435.471
35	Kota Tegal	220.303	236.194	241.785

(dalam jutaan rupiah)

Lampiran 3

Laporan realisasi Belanja daerah tahun 2007

No.	Daerah	BELANJA	BELANJA													
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG							BELANJA LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG				
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BUNGA	BELANJA SUBSIDI	BELANJA HIBAH	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA		BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	
2007																
1	Kab. Banjarnegara	620.943	405.474	330.145					22.620		51.708	1.000	215.470	23.343	64.118	128.008
2	Kab. Banyumas	866.677	597.839	502.408	107				45.128	438	43.759	6.000	268.837	51.464	105.601	111.772
3	Kab. Batang	529.407	303.427	247.523	358	3.005	7.857		18.175		24.509	2.000	225.980	46.842	63.467	115.671
4	Kab. Blora	637.082	396.927	338.724					24.431		31.546	2.225	240.155	26.415	81.855	131.884
5	Kab. Boyolali	693.115	446.086	380.595	75		9.448		11.913	1.196	33.782	9.078	247.029	29.999	105.475	111.554
6	Kab. Brebes	916.849	546.504	435.635	569				51.757	92	46.018	12.433	370.345	53.436	125.965	190.944
7	Kab. Cilacap	894.516	530.656	458.877	80				27.800	5.343	35.055	3.500	363.860	55.370	105.711	202.779
8	Kab. Demak	636.275	359.316	286.188					36.999	887	35.239	4	276.959	34.814	86.915	155.229
9	Kab. Grobogan	739.195	430.010	381.492	266		450		25.250	800	19.715	2.037	309.185	45.131	110.648	153.407
10	Kab. Jepara	611.500	345.948	265.262	300				56.034		22.352	2.000	265.553	46.252	84.573	134.727
11	Kab. Karanganyar	632.500	405.232	329.283	959	220			32.572	2.883	34.315	5.000	227.268	38.054	86.120	103.094
12	Kab. Kebumen	883.424	498.827	406.904	110				25.290	16	63.007	3.500	384.597	45.958	95.914	242.725
13	Kab. Kendal	631.571	358.231	320.883					15.318		21.655	375	273.340	26.562	114.195	132.584
14	Kab. Klaten	873.587	617.060	518.290					36.133	849	58.229	3.559	256.527	20.875	86.876	148.776
15	Kab. Kudus	654.273	349.374	297.832	5.840	1.250	20.934		10.302	1.912	10.953	350	304.899	37.440	149.216	118.243
16	Kab. Magelang	791.818	479.729	401.611	146				3.245		71.227	3.500	312.089	28.358	148.907	134.825
17	Kab. Pati	806.954	477.299	430.711					14.201	556	24.237	7.595	329.654	35.071	122.152	172.432
18	Kab. Pekalongan	525.330	365.622	276.562	238				59.885	50	25.747	3.140	159.709	29.916	64.594	65.199
19	Kab. Pemalang	643.960	328.941	278.826					16.242	1.080	27.020	5.772	315.019	49.969	108.385	156.665
20	Kab. Purbalingga	570.961	357.671	300.375	70				15.760	38	37.427	4.000	213.290	19.651	91.636	102.003
21	Kab. Purworejo	618.099	429.650	373.352	200		7.500		18.815	595	26.188	3.000	188.449	14.652	64.201	109.596
22	Kab. Rembang	565.692	316.001	234.741	100				49.087	0	27.782	4.291	249.691	35.270	64.055	150.367
23	Kab. Semarang	674.034	372.999	319.450		117	19.163		8.832	467	22.970	1.999	301.035	35.466	120.022	145.546
24	Kab. Sragen	707.066	437.686	393.256					19.606	563	21.001	3.260	269.381	34.049	78.830	156.502
25	Kab. Sukoharjo	616.795	371.851	371.851									244.944	38.401	109.752	96.790
26	Kab. Tegal	717.616	403.728	329.607	383				28.358		30.380	15.000	313.888	55.804	97.208	160.876
27	Kab. Temanggung	519.948	312.602	237.072	1.870	423	10.839		16.843	82	43.473	2.000	207.346	27.079	67.476	112.791
28	Kab. Wonogiri	716.890	493.385	431.332			5.114		7.060	23.290	23.090	3.500	223.505	28.896	100.109	94.500
29	Kab. Wonosobo	522.731	317.125	262.677			12.869		3.978		33.600	4.000	205.606	17.932	61.219	126.456
30	Kota Magelang	323.171	168.941	152.047					9.636		2.758	4.500	154.230	22.360	62.314	69.556
31	Kota Pekalongan	313.088	157.559	115.453	120				31.503		5.827	4.656	155.529	17.470	68.481	69.577
32	Kota Salatiga	283.951	158.922	148.966	73				9.076	187	120	500	125.030	18.460	43.283	63.287
33	Kota Semarang	1.238.237	613.414	544.607					55.236	4.015	6.556	3.000	624.823	70.746	360.999	193.078
34	Kota Surakarta	639.638	334.995	283.368	2.561				35.504		12.562	1.000	304.643	57.484	94.819	152.340
35	Kota Tegal	369.340	140.850	136.267	506		75		2.002			2.000	228.490	38.591	86.346	103.553

(dalam jutaan rupiah)

Lampiran 4

Laporan realisasi Belanja daerah tahun 2008

No.	Daerah	BELANJA	BELANJA													
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG							BELANJA LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG				
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BUNGA	BELANJA SUBSIDI	BELANJA HIBAH	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA		BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL	
2008																
1	Kab. Banjarnegara	707.148	476.974	398.471			5.500	16.438			54.013	2.552	230.174	23.287	81.737	125.150
2	Kab. Banyumas	1.046.091	712.684	595.001			8.742	58.406	438		47.097	3.000	333.407	62.602	125.349	145.456
3	Kab. Batang	603.586	352.313	287.643	358	2.150	11.606	2.400			46.656	1.500	251.273	54.097	69.302	127.874
4	Kab. Blora	841.778	493.121	407.680	120		5.642	24.861			52.818	2.000	348.657	42.366	147.788	158.503
5	Kab. Boyolali	788.925	506.267	506.267									282.658	25.357	126.123	131.178
6	Kab. Brebes	1.038.723	632.007	533.362	569		1.100	58.836	100		29.973	8.067	406.716	47.790	144.562	214.364
7	Kab. Cilacap	1.047.201	674.583	571.353	80		16.244	27.429	6		55.129	4.342	372.618	53.975	110.682	207.961
8	Kab. Demak	708.194	455.461	354.437			200	56.130	1.803		39.891	3.000	252.733	31.516	112.249	108.968
9	Kab. Grobogan	833.353	500.931	445.694	266		400	27.233	741		24.560	2.037	332.422	46.509	139.790	146.123
10	Kab. Jepara	754.396	438.664	346.839			12.250	50.705	7.500		19.370	2.000	315.732	42.044	115.850	157.838
11	Kab. Karanganyar	796.488	563.030	451.297	1.862	80	18.491	43.521	3.170		39.609	5.000	233.458	30.809	73.880	128.769
12	Kab. Kebumen	911.892	566.632	468.274	110			18.665	86		75.997	3.500	345.260	55.993	106.227	183.040
13	Kab. Kendal	771.433	464.458	396.264	175		4.141	24.066			39.062	750	306.975	27.627	164.672	114.676
14	Kab. Klaten	1.015.523	726.974	602.267			633	47.130	800		67.140	9.004	288.549	24.178	114.509	149.862
15	Kab. Kudus	729.760	427.427	368.892	112	2.000	26.942	10.664	1.914		15.953	950	302.333	31.510	120.309	150.514
16	Kab. Magelang	904.917	611.684	496.346	146		24.056	19.490			68.146	3.500	293.233	21.872	149.370	121.991
17	Kab. Pati	990.449	567.413	497.848			10.652	13.757	780		32.978	11.398	423.036	40.859	172.570	209.607
18	Kab. Pekalongan	670.632	473.015	348.444	238			89.604	250		31.079	3.400	197.617	29.950	79.810	87.857
19	Kab. Pemasang	743.391	480.571	414.793	503		1.000	9.056	1.080		49.139	5.000	262.820	54.786	94.634	113.400
20	Kab. Purbalingga	715.223	405.998	337.997	70	750		16.207	38		47.936	3.000	309.225	24.402	104.879	179.944
21	Kab. Purworejo	710.537	499.156	440.655	115		21.363	6.535	353		27.635	2.500	211.381	20.403	82.827	108.151
22	Kab. Rembang	596.094	355.628	291.686	65		127	37.895			21.855	4.000	240.466	37.230	76.243	126.993
23	Kab. Semarang	726.553	407.176	350.009		117	18.239	7.940	83		29.788	1.000	319.377	40.937	115.626	162.814
24	Kab. Sragen	802.642	534.467	483.044			2.827	17.666	608		28.072	2.250	268.175	33.085	82.368	152.722
25	Kab. Sukoharjo	720.414	438.139	372.504	146			16.278	1.058		47.153	1.000	282.275	50.095	115.627	116.553
26	Kab. Tegal	869.416	519.786	412.071	383		14.221	30.654	973		46.484	15.000	349.630	66.574	90.656	192.400
27	Kab. Temanggung	594.489	379.955	285.526	1.860	99	13.304	26.701	43		52.172	250	214.534	26.997	64.362	123.175
28	Kab. Wonogiri	828.131	560.579	466.617		770	6.978	7.257	23.133		50.624	5.200	267.552	32.206	109.018	126.328
29	Kab. Wonosobo	616.555	385.917	315.359			7.572	2.428			58.558	2.000	230.638	21.147	62.374	147.117
30	Kota Magelang	416.823	169.562	154.377			5.315	5.080	290			4.500	247.261	26.104	103.682	117.475
31	Kota Pekalongan	390.248	193.332	169.876			8.066	4.000			7.295	4.095	196.916	25.073	94.349	77.494
32	Kota Salatiga	1.098.481	877.046	869.652	73			6.514			307	500	221.435	25.346	51.687	144.402
33	Kota Semarang	1.351.845	650.620	600.538	3.850		5.211	30.506			7.515	3.000	701.225	75.006	461.945	164.274
34	Kota Surakarta	765.306	408.110	365.057	2.561			27.542			11.950	1.000	357.196	59.217	131.002	166.977
35	Kota Tegal	406.025	177.860	163.003	506		9.002	3.349				2.000	228.165	51.946	85.644	90.575

(dalam jutaan rupiah)

Lampiran 5
Laporan realisasi Belanja daerah tahun 2009

No.	Daerah	BELANJA	BELANJA													
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA TIDAK LANGSUNG									BELANJA LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG		
				BELANJA PEGAWAI	BELANJA BUNGA	BELANJA SUBSIDI	BELANJA HIBAH	BELANJA BANTUAN SOSIAL	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA LANGSUNG		BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG DAN JASA	BELANJA MODAL
2009																
1	Kab. Banjarnegara	729.036	527.431	453.421			2.480	14.408			54.592	2.531	201.605	26.168	72.973	102.464
2	Kab. Banyumas	1.112.316	718.120	633.496			823	34.013			47.423	2.365	394.196	48.519	161.668	184.009
3	Kab. Batang	611.716	399.678	333.596	358	4.149	7.609	6.142			47.823		212.038	42.351	74.828	94.859
4	Kab. Blora	871.729	591.472	466.000	120		9.837	40.890			73.376	1.250	280.257	28.340	121.842	130.076
5	Kab. Boyolali	880.086	654.704	579.259	75		2.304	26.305	5.869		37.042	3.850	225.382	11.969	76.688	136.725
6	Kab. Brebes	1.043.264	716.006	628.674	569	250	1.110	61.598	50		19.755	4.000	327.258	28.995	132.719	165.544
7	Kab. Cilacap	1.142.689	824.872	675.207	80		66.770	19.302	5.760		54.252	3.500	317.817	62.593	134.373	120.851
8	Kab. Demak	739.360	474.574	392.244			3.012	31.485	2.172		43.660	2.000	264.786	20.082	73.577	171.127
9	Kab. Grobogan	817.577	542.342	484.183	5.124		10.246	17.012	741		22.536	2.500	275.235	41.379	117.296	116.560
10	Kab. Jepara	804.539	491.121	409.765			7.096	42.590	7.970		21.700	2.000	313.418	43.850	141.559	128.009
11	Kab. Karanganyar	799.688	582.328	482.688	2.104		3.172	37.698	2.000		49.667	5.000	217.360	35.982	81.089	100.289
12	Kab. Kebumen	993.217	678.680	581.996	38		150	30.367	984		64.645	500	314.537	46.919	92.866	174.752
13	Kab. Kendal	799.716	520.678	444.200	175		3.103	28.840			41.810	2.550	279.038	27.228	155.567	96.243
14	Kab. Klaten	1.023.033	808.683	711.909			3.604	41.496	397		46.786	4.491	214.350	14.903	90.624	108.823
15	Kab. Kudus	900.715	505.978	435.612	112	2.000	19.806	24.913	2.154		20.082	1.300	394.737	27.634	138.705	228.399
16	Kab. Magelang	911.934	685.442	573.826	60		15.722	26.116			68.217	1.500	226.492	15.925	92.772	117.794
17	Kab. Pati	985.496	646.875	563.871			16.226	11.572	780		44.873	9.553	338.621	19.261	163.656	155.704
18	Kab. Pekalongan	697.229	481.816	410.052	238			42.052	250		28.225	1.000	215.413	36.295	76.997	102.120
19	Kab. Pemalang	769.848	508.803	442.512	503		6.506	13.618	1.784		41.206	2.675	261.045	53.942	125.891	81.213
20	Kab. Purbalingga	702.705	444.736	378.172	70	750	3.796	13.165	38		46.745	2.000	257.969	19.678	103.444	134.848
21	Kab. Purworejo	754.722	573.895	504.215	115		24.202	5.035	353		37.476	2.500	180.827	20.654	66.874	93.300
22	Kab. Rembang	593.546	418.948	354.347	1.445		7.100	34.024			19.981	2.051	174.598	27.246	58.728	88.623
23	Kab. Semarang	787.323	488.933	431.660	20	117	12.607	8.040	172		35.317	1.000	298.390	35.435	138.771	124.183
24	Kab. Sragen	810.435	563.119	516.253			1.418	13.916	757		28.143	2.633	247.316	29.162	97.948	120.207
25	Kab. Sukoharjo	740.005	525.920	466.003	96		1.635	23.707	1.058		32.421	1.000	214.085	33.937	87.711	92.437
26	Kab. Tegal	913.245	585.670	497.593	369		888	39.366	973		41.482	5.000	327.575	46.438	110.053	171.083
27	Kab. Temanggung	609.738	447.937	347.015	860		41.644	9.801	25		47.050	1.541	161.801	19.145	54.093	88.563
28	Kab. Wonogiri	977.243	687.208	595.166		570	10.426	6.506	23.229		48.812	2.500	290.035	42.170	117.678	130.188
29	Kab. Wonosobo	632.221	427.182	360.436			10.515	2.493			52.738	1.000	205.039	6.085	66.789	132.166
30	Kota Magelang	471.235	264.254	209.629			7.125	45.000				2.500	206.981	25.507	85.635	95.839
31	Kota Pekalongan	390.965	219.975	184.658			16.733	4.000			12.055	2.529	170.990	22.635	77.799	70.555
32	Kota Salatiga	430.982	206.565	192.000			4.878	8.880			307	500	224.417	20.109	61.552	142.757
33	Kota Semarang	1.604.782	859.335	759.995	650		20.946	76.244				1.500	745.447	104.056	366.861	274.530
34	Kota Surakarta	842.537	491.285	399.964	2.561		62.780	14.981			10.000	1.000	351.252	39.283	121.571	190.399
35	Kota Tegal	478.916	207.938	191.245	317		9.045	5.831				1.500	270.978	28.783	113.314	128.880

(dalam jutaan rupiah)

Lampiran 6

Hasil Output SPSS Belanja Langsung

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU, PAD ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: B.Insng

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.675 ^a	.455	.444	46.349560	2.112

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: B.Insng

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	177748.287	2	88874.143	41.370	.000 ^a
	Residual	212679.887	99	2148.282		
	Total	390428.174	101			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: B.Insng

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	100.935	19.091		5.287	.000		
	PAD	1.325	.292	.375	4.545	.000	.810	1.235
	DAU	.198	.039	.421	5.106	.000	.810	1.235

a. Dependent Variable: B.Insng

Coefficient Correlations^a

Model			DAU	PAD
1	Correlations	DAU	1.000	-.436
		PAD	-.436	1.000
	Covariances	DAU	.002	-.005
		PAD	-.005	.085

a. Dependent Variable: B.Insng

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimensi on	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	PAD	DAU
1	1	2.911	1.000	.01	.01	.01
	2	.056	7.235	.23	.97	.11
	3	.034	9.315	.76	.02	.89

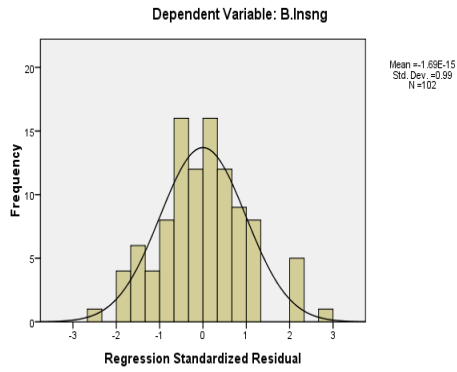
a. Dependent Variable: B.Insng

Residuals Statistics^a

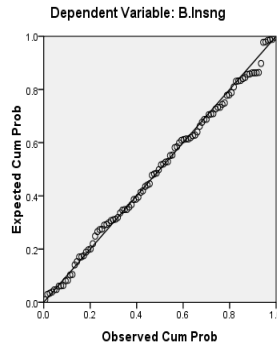
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1.77346E2	3.89214E2	2.67758E2	41.950972	102
Std. Predicted Value	-2.155	2.895	.000	1.000	102
Standard Error of Predicted Value	4.625	17.629	7.469	2.733	102
Adjusted Predicted Value	1.78642E2	3.96889E2	2.67681E2	42.099666	102
Residual	-1.086297E2	1.265601E2	.000000	45.888359	102
Std. Residual	-2.344	2.731	.000	.990	102
Stud. Residual	-2.395	2.754	.001	1.005	102
Deleted Residual	-1.133965E2	1.287002E2	.076273	47.255432	102
Stud. Deleted Residual	-2.455	2.851	.002	1.016	102
Mahal. Distance	.015	13.620	1.980	2.416	102
Cook's Distance	.000	.097	.010	.019	102
Centered Leverage Value	.000	.135	.020	.024	102

a. Dependent Variable: B.Insng

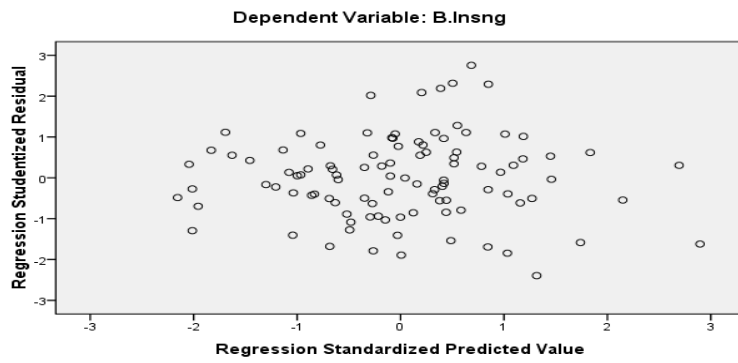
Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PAD	DAU
N		102	102
Normal Parameters ^a	Mean	5.21814E1	4.93757E2
	Std. Deviation	1.758002E	1.323042E
Most Extreme Differences	Absolute	.081	.075
	Positive	.081	.075
	Negative	-.044	-.073
Kolmogorov-Smirnov Z		.820	.762
Asymp. Sig. (2-tailed)		.512	.606

a. Test distribution is Normal.

b. calculated from data.

Lampiran 7

Hasil Output SPSS Belanja Tidak Langsung

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-25.606	35.398		-.723	.471		
	PAD	1.043	.541	.121	1.930	.050	.810	1.235
	DAU	.882	.072	.768	12.279	.000	.810	1.235

a. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU, PAD ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.828 ^a	.686	.680	85.942687	1.802

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1598326.725	2	799163.363	108.198	.000 ^a
	Residual	731228.397	99	7386.145		
	Total	2329555.122	101			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng

Coefficient Correlations^a

Model		DAU	PAD
1	Correlations	DAU	1.000
		PAD	-.436
	Covariances	DAU	.005
		PAD	-.017

a. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimensi on	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	PAD	DAU
1	1	2.911	1.000	.01	.01	.01
	2	.056	7.235	.23	.97	.11
	3	.034	9.315	.76	.02	.89

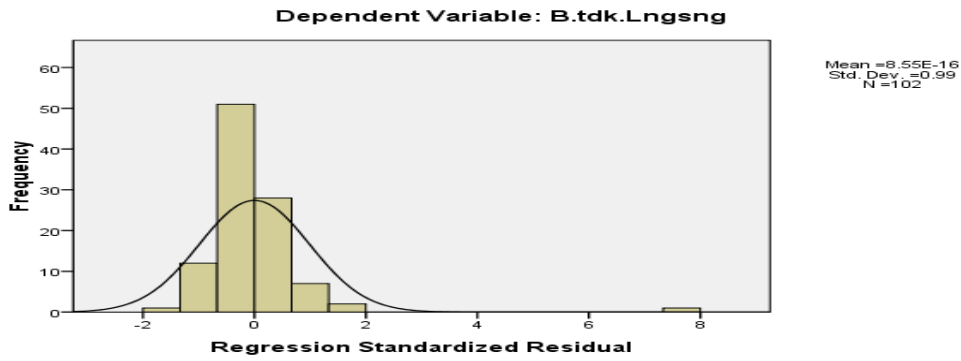
a. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng

Residuals Statistics^a

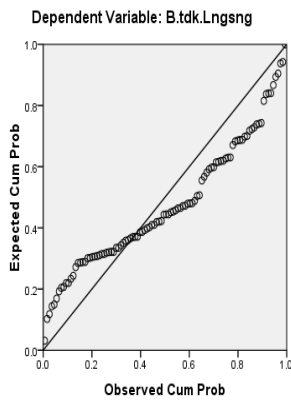
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1.93683E2	7.69481E2	4.64378E2	125.797524	102
Std. Predicted Value	-2.152	2.425	.000	1.000	102
Standard Error of Predicted Value	8.576	32.687	13.849	5.068	102
Adjusted Predicted Value	1.73271E2	7.63526E2	4.64375E2	125.786371	102
Residual	-1.603551E2	6.680546E2	.000000	85.087514	102
Std. Residual	-1.866	7.773	.000	.990	102
Stud. Residual	-1.879	7.978	.000	1.011	102
Deleted Residual	-1.626253E2	7.037747E2	.002580	88.763580	102
Stud. Deleted Residual	-1.904	13.285	.052	1.462	102
Mahal. Distance	.015	13.620	1.980	2.416	102
Cook's Distance	.000	1.135	.015	.112	102
Centered Leverage Value	.000	.135	.020	.024	102

a. Dependent Variable: B.tdk.Lngsng

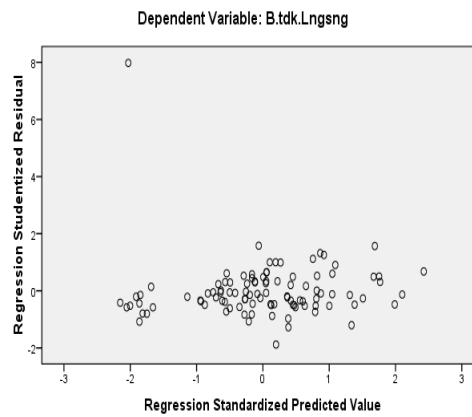
Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		PAD	DAU
N		102	102
Normal Parameters ^a	Mean	5.21814E1	4.93757E2
	Std. Deviation	1.758002E1	1.323042E2
Most Extreme Differences	Absolute	.081	.075
	Positive	.081	.075
	Negative	-.044	-.073
Kolmogorov-Smirnov Z		.820	.762
Asymp. Sig. (2-tailed)		.512	.606

- a. Test distribution is Normal.
b. calculated from data.